

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : JL. SORUMBA NO. 5 AB KEL.WOWAWANGGU KEC.KADIA KOTA
KENDARI
Nomor Telepon : 4013430003
Penjelasan Umum :

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SURYANINGSIH	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisari 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 7. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional b) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 8) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: Fungsi audit intern dan Fungsi manajemen risiko kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	BUYUNG SARITA	Komisaris Utama	1)Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 3)Dalam melaksanakan pengawasan yang dimaksud , Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
2	RAHMAT MADJID	Komisaris	1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR 2)Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 3)Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rekomendasi Kepada Direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SURYANINGSIH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SURYANINGSIH	Tidak ada	Tidak ada	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	BUYUNG SARITA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RAHMAT MADJID	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	BUYUNG SARITA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RAHMAT MADJID	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	298714050	2	215074116
2	Tunjangan	1	49785675	2	35845686
3	Tantiem	1	72450442	2	28980177
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	1	101430619	0	0
	Total		522380786		279899979

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tunjangan perumahan diberikan Direktur utama karena perusahaan tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan. Tunjangan perumahan diberikan secara bulanan sebesar Rp. 1.350.000	Tidak ada
2	Transportasi	Direktur Utama memperoleh fasilitas 1 unit mobil dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,80	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,60	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	02-01-2023	2	1) Pencapaian RBB Tahun 2022 dan Laporan Keuangan Tahun 2022; 2) Laporan Realisasi dan Pengawasan RBB Semester II Tahun 2022; 3) Pemenuhan data pemeriksaan KAP Tahun Buku 2022.
2	09-02-2023	2	1) Persiapan RUPS Tahun 2022; 2) Hasil pemeriksaan KAP; 3) Kinerja BPR
3	23-02-2023	7	1) Menghadapi isu tentang perpindahan dana TPP; 2) Membahas permasalahan BPR dengan SEKDA.
4	08-03-2023	7	1) Perubahan Sturuktur Organisasi; 2) Hal-hal terkait operasional.
5	30-03-2023	7	1) Penerapan APU PPT; 2) Penurunan NPL; 3) Penyelesaian AYDA; 4) Pemberian THR bagi Pengurus dan Karyawan
6	26-06-2023	2	1) Tindak Lanjut Temuan OJK Tahun 2023; 2) Persiapan RUPS Luar Biasa; 3) Revisi Laporan RBB Tahun 2023
7	26-09-2023	2	1) Persiapan Pindah alamat kantor pusat; 2) Kinerja dan pencapaian BPR; 3) Penerapan APU PPT.
8	02-10-2023	2	1) Pencatatan dan pengurusan kelengkapan pindah alamat kantor; 2) Pembahasan mengenai penyelamatan kredit bermasalah serta pencairan kredit baru dengan plafon besar; 3) Persiapan inklusi keuangan Tahun 2023; 4) Pelatihan-pelatihan yang telah dan akan diikuti.
9	14-11-2023	25	1) Pencapaian kinerja BPR SEMESTER I dan II Tahun 2023; 2) RBB Tahun 2024
10	19-12-2023	2	1) Temuan OJK; 2) Pencairan kredit dan penurunan NPL; 3) Pencapaian RBB Tahun 2023; 4) Penunjukkan KAP pemeriksaan Tahun 2023; 5) Pemenuhan kelengkapan Direksi.
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
10			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	BUYUNG SARITA	10	0	100,00
2	RAHMAT MADJID	10	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PD BPR Bahteramas Kendari
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. SORUMBA NO. 5 AB KEL.WOWAWANGGU KEC.KADIA KOTA KENDARI
Nomor Telepon	: 4013430003
Modal Inti BPR	: 11.908.863.953,00
Total Aset BPR	: 61.312.142.666,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,6
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Hasil penilaian penerapan Tata Kelola PD BPR Bahteramas Kendari periode Tahun 2023 ditetapkan dengan peringkat komposit 1 atau sangat baik. Pada Tahun 2023 kinerja BPR semakin baik yang ditunjukkan oleh pencapaian kinerja keuangan dimana semua indikator utama mencapai target rencana bisnis yang telah ditetapkan. PD BPR Bahteramas Kendari memiliki 1 orang Direksi dan 2 orang Dewan Pengawas, saat ini belum memiliki Direktur Operasional dan masih dikomunikasikan dengan PSP untuk proses perekrutannya. BPR juga memiliki 4 orang Pejabat Eksekutif yang melengkapi struktur sehingga operasional kantor dapat berjalan dengan baik. Selain itu, BPR juga telah memiliki bangunan gedung kantor milik sendiri yang telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa sehingga pelayanan yang dilakukan semakin baik dan dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja BPR kedepannya. Penerapan Tata Kelola dilakukan secara menyeluruh pada semua bagian yang hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya. Namun disamping itu kualitas SDM masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan mengikutsertakan pada berbagai pelatihan-pelatihan, mengoptimalkan kinerja Pejabat Eksekutif untuk selalu mereview ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mensosialisasikan ke seluruh manajemen, serta memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga tercipta kualitas SDM yang kompeten sehingga pengelolaan Tata Kelola BPR menjadi lebih baik lagi pada periode selanjutnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,65	0,16	1,40	0.280	PD. BPR Bahteramas Kendari memiliki jumlah direksi 1 orang dan belum memiliki direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Proses penerapan tata kelola telah dijalankan secara memadai dan hasilnya telah dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,70	0,20	1,62	0.243	PD. BPR Bahteramas Kendari memiliki jumlah dewan pengawas sebanyak 2 orang yang berdomisili di kota kendari. Proses pengawasan telah dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab secara memadai.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum memiliki fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,20	1,60	0.160	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dan akan dilakukan pengkinian jika terdapat perubahan ketentuan. Selama periode tahun 2023 tidak terdapat tindakan yang dapat merugikan BPR
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,04	0,27	2,51	0.251	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,70	0,15	1,65	0.165	BPR memiliki Audit Internal dan standar prosedur kebijakan internal serta telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,30	1,60	0.040	BPR telah menunjuk KAP untuk pemeriksaan Tahun 2023 yang terdaftar di OJK. namun pelaksanaan audit akan dilaksanakan pada awal tahun 2024, sehingga pada saat laporan tata kelola ini dibuat masih dalam proses pemeriksaan KAP.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,92	0,10	1,86	0.186	BPR memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan standar prosedur kebijakan internal serta telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,15	1,45	0.109	BPR telah memiliki kebijakan tentang BMPK dan selama Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK karena jumlah modal BPR memadai.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,00	0,10	0,77	0.058	Direksi telah menyusun RBB dan disetujui oleh Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah diungkapkan pada Pemegang Saham Pengendali melalui asistensi RBB.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.128	Sistem pelaporan dan transparansi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan SDM yang memadai.
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPR Bahteramas Kendari memiliki Direksi 1 orang yaitu Direktur Utama, sedangkan Direktur Operasional belum ada.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direktur utama tinggal dikota kendari di provinsi sulawesi tenggara
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direktur utama tidak merangkap ataupun mengikuti organisasi lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat ataupun pihak jasa independen .
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direktur utama yang terpilih telah lulus ujian kemampuan dan telah ditetapkan dalam RUPS
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direktur utama melaksanakan tanggung jawab sendiri tanpa adanya direktur operasional
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direktur utama menindaklanjuti setiap adanya temuan tim audit maupun hasil pengawasan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direktur utama telah Melengkapi data informasi dengan tepat waktu yang akan diberikan kepada komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat yang dituangkan dalam setiap risalah rapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direktur utama tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Dilaksanakan oleh Direktur Utama Karena tidak memiliki Direktur Operasional
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Dilaksanakan oleh Direktur Utama Karena tidak memiliki Direktur Operasional
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direktur utama telah melaksanakan tata tertib tentang etika kerja dan waktu kerja
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direktur utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direktur utama telah menginformasikan sebagian besar tentang kebijakan strategis BPR
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Risalah rapat serta dokumentasi selalu ada dalam lampiran hasil rapat direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pencapaian dan peningkatan kinerja dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direktur utama telah menyampaikan laporan ke OJK dan asosiasi BPR
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR BAHTERAMAS KENDARI memiliki 2 orang komisaris yaitu ketua dan anggota komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Direksi 1 orang dikarenakan belum terdapat Direktur Operasional
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Ketua dan anggota pengawas yang terpilih telah lulus ujian kemampuan dan telah ditetapkan dalam RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ketua dan anggota pengawas tinggal dikota kendari di provinsi sulawesi tenggara
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR BAHTERAMAS KENDARI memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 memiliki 2 komisaris yang independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Ketua dan anggota komisaris BPR BAHTERAMAS KENDARI mengikuti aturan tata tertib tentang etika dan waktu kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Ketua dan anggota komisaris tidak rangkap jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Ketua dan anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Ketua dan anggota komisaris tidak memiliki hubungan dengan pihak yang lain
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Ketua dan anggota dewan pengawas telah melaksanakan pengawasan di BPR bahteramas kendari tentang prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam risalah rapat Dewan Pengawas
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan pengawas ikut memantau pelaksanaan kebijakan strategi BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan pengawas telah menjalankan pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan pengawas ikut memastikan penyelesaian temuan audit intern maupun ekstren
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan pengawas telah melaksanakan rapat bersama direksi dan staff di BPR serta menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Hasil keputusan rapat bersama telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Pemantauan fungsi kepatuhan belum dilaksanakan karena ada nya kekosongan di direktur operasional/kepatuhan, namun pemantauan tetap dilaksanakan pada Direktur Utama.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan		Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,50		
	Nilai struktur	0,00		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,40		
	Nilai Proses	0,00		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan mengenai sistem dan prosedur benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dewan pengawas, Direktur utama dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan merugikan ataupun mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Dalam rapat pengambilan keputusan diselesaikan dengan hasil risalah dan didokumentasi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan oleh PE Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE kepatuhan telah menyusun pengkinian pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas fungsi kepatuhan yang tertuang pada SOP dan JOB Desk
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan telah melaksanakan kebijakan prosedur sesuai ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan telah melakukan revidi penyempurnaan kebijakan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR telah melakukan perbaikan mengenai kebijakan dan disesuaikan dengan ketentuan OJK

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama. Direktur Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR Bahteramas Kendari belum memiliki direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan dijalankan oleh pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko yang dibawah oleh Direktur Utama. Tidak terdapat kebijakan yang menyimpang dari POJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PE audit intern telah memiliki pedoman kerja sesuai ketentuan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE audit intern melaksanakan sesuai ketentuan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE audit intern melaksanakan tanggung jawab kepada direktur sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah mengikutsertakan PE untuk pelatihan untuk pengembangan sumber daya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	fungsi audit intern telah menerapkan pedoman sesuai ketentuan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR bahteramas kendari kurang dari Rp. 50.000.000.000,00
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	PE audit intern telah melakukan program audit dan berjalan sesuai ketentuan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu SDM melalui kegiatan pelatihan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan tersebut sesuai ketentuan OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR bahteramas kendari kurang dari Rp. 50.000.000.000,00

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Modal inti kurang dari 50 M,BPR telah menyampaikan apabila ada pengangkatan atau pemberhentian PE ke OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan KAP telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan, telah terdapat PKS dan telah dilaporkan kepada OJK, namun pelaksanaan audit akan dilaksanakan pada awal tahun 2024, sehingga pada saat laporan tata kelola ini dibuat masih dalam proses pemeriksaan KAP.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukkan KAP yang terdaftar OJK berdasarkan persetujuan RUPS atau usulan Dewan Pengawas
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah terdapat PKS antara BPR dan KAP yang telah ditunjuk dan telah dilaporkan kepada OJK, namun pelaksanaan audit akan dilaksanakan pada awal tahun 2024, sehingga pada saat laporan tata kelola ini dibuat masih dalam proses pemeriksaan KAP.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Telah terdapat PKS antara BPR dan KAP yang telah ditunjuk dan telah dilaporkan kepada OJK, namun pelaksanaan audit akan dilaksanakan pada awal tahun 2024, sehingga pada saat laporan tata kelola ini dibuat masih dalam proses pemeriksaan KAP.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah terdapat PKS antara BPR dan KAP yang telah ditunjuk dan telah dilaporkan kepada OJK, namun pelaksanaan audit akan dilaksanakan pada awal tahun 2024, sehingga pada saat laporan tata kelola ini dibuat masih dalam proses pemeriksaan KAP.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Modal inti kurang dari 50 M ,BPR telah menunjuk PE kepatuhan dan Manajemen resiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur Manajemen Resiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	BPR telah memiliki pedoman kebijakan dan setiap transaksi selalu dievaluasi dan diputuskan oleh Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan pengawas telah menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen resiko sesuai kebijakan yang dibuat
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR masih dalam proses penerapan terhadap faktor resiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah melakukan penerapan sistem pengendalian intern terhadap sebagian proses operasional BPR
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melakukan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki core banking sistem yang memadai sesuai dengan ketentuan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	BPR telah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen resiko
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah membuat laporan profil risiko dan telah dilaporkan ke OJK sesuai dengan ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaporkan jika terdapat produk dan aktivitas baru kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan tertulis terkait dengan BMPK yang termasuk bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan pengkinian kebijakan BMPK sesuai dengan ketentuan OJK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Dalam pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR membuat laporan terkait BMPK yang telah disesuaikan ketentuan yang berlaku
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melakukan pelanggaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai visi dan misi
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB BPR telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas jasa keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB BPR telah disetujui oleh PSP sesuai dalam kegiatan RUPS
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan RBB BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB BPR telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sistem pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan sumber daya manusia yang cukup kompeten
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan yang memuat informasi umum tentang keuangan BPR disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi mengenai produk layanan data nasabah BPR telah dilaksanakan sesuai ketentuan Otoritas jasa keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR telah melaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD BPR Bahteramas Kendari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BPR BAHTERAMAS KENDARI
TAHUN 2023

Kendari, 15 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:


BUYUNG SARITA
Ketua Dewan Pengawas


PD. BPR BAHTERAMAS
KENDARI


SURYANINGSIH
Direktur Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PD BPR BAHTERAMAS KENDARI
Alamat : Jl. Sorumba No. 5 AB Kel. Wowawunggu Kec. Kadia
Kota Kendari
No Telp : 0401-3430003
Posisi Laporan : Tahun 2023
Modal Inti : Rp. 11.908.863.953,-
Total Aset : Rp. 61.312.142.666,-
Status Audit : Ya
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,69
Peringkat : 1
Komposit



KESIMPULAN

Hasil penilaian penerapan Tata Kelola PD BPR Bahteramas Kendari periode Tahun 2023 ditetapkan dengan peringkat komposit 1 atau sangat baik. Pada Tahun 2023 kinerja BPR semakin baik yang ditunjukkan oleh pencapaian kinerja keuangan dimana semua indikator utama mencapai target rencana bisnis yang telah ditetapkan. PD BPR Bahteramas Kendari memiliki 1 orang Direksi dan 2 orang Dewan Pengawas, saat ini belum memiliki Direktur Operasional dan masih dikomunikasikan dengan PSP untuk proses perekrutannya. BPR juga memiliki 4 orang Pejabat Eksekutif yang melengkapi struktur sehingga operasional kantor dapat berjalan dengan baik. Selain itu, BPR juga telah memiliki bangunan gedung kantor milik sendiri yang telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa sehingga pelayanan yang dilakukan semakin baik dan dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja BPR kedepannya. Penerapan Tata Kelola dilakukan secara menyeluruh pada semua bagian yang hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya. Namun disamping itu kualitas SDM masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan mengikutsertakan pada berbagai pelatihan-pelatihan, mengoptimalkan kinerja Pejabat Eksekutif untuk selalu mereview ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mensosialisasikan ke seluruh manajemen, serta memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga tercipta kualitas SDM yang kompeten sehingga pengelolaan Tata Kelola BPR menjadi lebih baik lagi pada periode selanjutnya.

Kendari, 15 Januari 2023

PD BPR BAHTERAMAS KENDARI


BUYUNG SARITA
Ketua Dewan Pengawas



SURYANINGSIH
Direktur Utama